

ABSTRAK

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019)

ILMA ANGGRAENI

NIM: 212374201019

Pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang menetapkan batas usia minimum pernikahan. Pernikahan di bawah umur sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, pendidikan, serta kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan anak, serta mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah praktik ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen kebijakan, serta laporan dari lembaga terkait. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak pernikahan dini terhadap aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan anak. Selain itu, norma sosial dan budaya di beberapa daerah masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Dampak pernikahan anak sangat luas, mencakup putusnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta rendahnya kemandirian ekonomi perempuan. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi tantangan, terutama dalam mekanisme dispensasi nikah yang masih sering disalahgunakan.

Sebagai upaya pencegahan, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional dalam meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan, serta menegakkan aturan hukum yang lebih ketat dalam pengajuan dispensasi nikah. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka pernikahan anak dapat ditekan dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.

Kata kunci: Pernikahan anak, faktor sosial-ekonomi, kebijakan hukum, kesehatan reproduksi, perlindungan anak.

ABSTRACT

SOCIOLOGICAL LEGAL ANALYSIS OF UNDERAGE MARRIAGE PHENOMENON (BASED ON LAW NO. 16 OF 2019)

ILMA ANGGRAENI

NIM: 212374201019

Child marriage remains a pressing social issue in Indonesia, despite the existence of regulations that establish the minimum legal age for marriage. This phenomenon is often driven by economic conditions, cultural norms, limited educational attainment, and a lack of understanding of reproductive health. This study aims to analyze the factors contributing to the high prevalence of child marriage and to assess the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 in addressing this practice.

This research adopts a normative legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature reviews of relevant laws, policy documents, and institutional reports. Furthermore, this study examines the social, economic, educational, and health impacts of early marriage.

The findings reveal that poverty and low educational attainment are the primary drivers of child marriage. Additionally, social and cultural norms in certain regions continue to normalize early marriage. The consequences of child marriage are extensive, including educational disruption, heightened reproductive health risks, and limited economic independence for women. The implementation of Law No. 16 of 2019 faces challenges, particularly in the misuse of the marriage dispensation mechanism.

Preventive efforts require synergy between the government, communities, and international organizations to strengthen reproductive health education, expand access to education for girls, and enforce stricter regulations on marriage dispensations. With a more comprehensive approach, the prevalence of child marriage can be reduced, ensuring stronger protection of children's rights.

Keywords : Child marriage, socio-economic factors, legal policy, reproductive health, child protection.